



PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati Adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.543.328.746.724 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.142.612.170.200 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus dua belas juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.950.000.000 (enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Retribusi ...

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.130.000.000 (tiga miliar seratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.630.000.000 (delapan miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.902.170.200 (enam puluh empat miliar sembilan ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.950.000.000 (enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

(10) Pajak ...

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah);
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah);

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.130.000.000 (tiga miliar seratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.825.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.005.000.000 (satu miliar lima juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.630.000.000 (delapan miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.902.170.200 (enam puluh empat miliar sembilan ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - b. Jasa Giro;
  - c. Pendapatan BLUD; dan
  - d. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
  - e. Pendapatan Bunga;
  - f. Hasil Penjualan Aset Lainnya;
  - g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
  - k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Tunjangan; dan
  - l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.778.170.200 (enam puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);
- (5) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

#### Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.233.613.666.812 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.179.375.232.000 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
  - e. Dana Insentif Daerah; dan
  - f. Dana Desa.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.152.922.000 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.734.535.724.000 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

(4) Dana ...

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.422.984.000 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.238.826.601.000 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus seribu rupiah);
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.98.437.001.000 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua seribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.500.000.000 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Dana Darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.500.000.000 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

#### Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.528.328.746.724 (satu triliun lima ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

c. Belanja ...

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.198.725.893.394 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
  - c. Belanja Pegawai;
  - d. Belanja Barang dan Jasa;
  - e. Belanja Bunga;
  - f. Belanja Subsidi;
  - g. Belanja Hibah; dan
  - h. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.780.230.997.915 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.404.194.066.219 (empat ratus empat miliar seratus sembilan puluh empat juta enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.000.829.260 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.158.542.343.430 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.681.307.113 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu seratus tiga belas rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.726.563.700 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.599.487.617 (seratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.84.985.000 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

#### Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.163.560.509.900 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.855.500.000 (lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.157.705.009.900 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2023 terdiri atas :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.151.602.909.712 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus dua juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih...



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.151.602.909.712 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus dua juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol)
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

#### Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.136.602.909.712) (minus seratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.136.602.909.712 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Pasal 22 ...

## Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- b. Lampiran II Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil
- g. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
- i. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

## Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI PADANG PARIAMAN,



*[Signature]*  
SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



*[Signature]*  
RUDY REPENALDI RILIS

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>142.612.170.200</b>
4.1.01	Pajak Daerah	65.950.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	225.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	225.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	225.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	225.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	225.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	225.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.300.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.300.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.300.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.000.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.000.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.200.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.200.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.200.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.500.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.500.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	22.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	22.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.130.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.825.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	515.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	515.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	70.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	70.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	550.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	550.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	300.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	160.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	35.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	30.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	30.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	50.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.005.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.000.000

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.630.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.630.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.630.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.902.170.200
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	150.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	150.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	20.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.000.000
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	2.000.000
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	2.000.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	60.778.170.200
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	60.778.170.200
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	60.778.170.200
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.233.613.666.812</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.179.375.232.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.080.938.231.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.152.922.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	980.340.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.275.349.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	214.896.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	972.006.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	91.393.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.618.938.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	734.535.724.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	734.535.724.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98.422.984.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	479.348.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.343.136.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.502.952.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	17.565.318.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.069.021.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	13.286.539.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.431.791.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.052.743.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	35.013.576.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.678.560.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	238.826.601.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.862.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	124.083.105.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.118.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.735.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.405.200.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.141.874.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	429.440.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	23.443.092.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.911.371.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	406.770.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	897.199.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	521.700.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	871.650.000
4.2.01.05	Dana Desa	98.437.001.000

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.05.01	Dana Desa	98.437.001.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	98.437.001.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.238.434.812
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.238.434.812
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.594.049.465
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.640.173.621
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.616.454.186
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	97.127.645
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.290.629.895
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.500.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.500.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	15.000.000.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	15.000.000.000
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	15.000.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.391.725.837.012</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.198.725.893.394</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	780.230.997.915
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	490.088.319.881
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	370.708.697.462
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	315.378.405.401
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	55.330.292.061
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	37.839.663.854
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30.101.319.805
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.738.344.049
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.833.109.238
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.833.109.238
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.387.175.595
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.052.894.561
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	334.281.034
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.823.211.341
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.689.409.875
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.133.801.466
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.769.586.921
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.343.056.828
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.426.530.093
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	426.538.581
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	426.538.581
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.608.460
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.290.038
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.318.422
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.162.374.141
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.769.705.457
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.392.668.684
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.294.100.201
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	686.996.441
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	607.103.760
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.838.254.087
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.093.433.656
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.744.820.431
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	111.448.802.962
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	94.292.436.159
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	91.223.508.210
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.068.927.949
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.470.504.725
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.465.256.966
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	5.247.759
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.189.747.309
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.189.747.309
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	12.496.114.769

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	11.759.262.836
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	736.851.933
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.941.956.200
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.426.350.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	507.350.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	90.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	9.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	60.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	900.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	50.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	60.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.100.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	450.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	137.200.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	18.000.000
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.100.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	16.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.800.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	900.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	90.250.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	150.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.800.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	124.083.105.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	124.083.105.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.118.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.118.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.542.551.600
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.542.551.600
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.634.749.600
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.909.735.200
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	725.014.400
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.596.733.733
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	936.904.500
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	936.904.500
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.545.440
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.545.440
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	118.167.714
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	118.167.714
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	93.690.450
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	93.690.450
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.358.511.525
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.358.511.525
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.670.148
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.670.148
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	70.691.198
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	70.691.198
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.175.200.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.175.200.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	793.800.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	793.800.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	941.785
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	941.785
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.382.190.973
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	81.358.679
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.248.571
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.745.712
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.291.838.011
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.289.920.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.289.920.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	157.500.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	157.500.000

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	200.039.139
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.408.800
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.408.800
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.452.018
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.452.018
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	436.340
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	436.340
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	301
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	301
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.717.312
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.717.312
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.592
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.592
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	412.776
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	412.776
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	16.950.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.450.000
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.500.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	116.424.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	116.424.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	116.424.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	23.838.722.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	23.838.722.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	23.838.722.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.194.066.219
5.1.02.01	Belanja Barang	128.968.206.658
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	128.968.206.658
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.410.063.810
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	105.528.813
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.491.744.849
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	167.281.500
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.750.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	36.550.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.819.694.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	653.432.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	370.917.650
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.635.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	11.229.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.740.951.777
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.637.082.477
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.820.420.266
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	156.909.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.658.586.045
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.033.177.642
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	467.717.805
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	967.297.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	375.286.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	172.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	118.470.870
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.947.380.375
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	86.066.242.379
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	24.215.800
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	168.101.150
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.749.385.700
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.143.689.250
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	35.000.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	328.560.000



**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	75.200.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	138.306.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	105.718.798.952
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	82.622.231.878
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.497.691.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	740.850.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	152.100.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.202.300.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.700.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	999.700.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.077.100.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	206.100.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	6.850.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	80.320.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	400.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.178.300.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	183.600.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.946.126.885
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.559.300.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	354.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.112.300.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.290.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.088.400.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	51.500.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	161.600.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	59.696.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	9.700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	327.790.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.057.500.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	125.825.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.623.971.993
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	503.600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.397.361.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	71.060.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	480.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	13.800.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	150.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.536.331.853
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.710.052.320
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.332.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.049.600.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	289.451.520
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	81.254.010
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	73.974.003
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.500.000
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	2.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.382.530.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.161.163.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	454.290.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	163.800.000
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.642.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	593.235.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	8.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.958.650.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.958.650.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.575.855.221
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	600.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	280.855.221
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	280.000.000
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	415.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	124.700.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	64.800.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	2.400.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	7.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	516.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	516.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.616.765.169
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.800.337.999
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	986.618.999
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.210.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.160.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	16.377.500
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.995.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.660.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	242.780.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.700.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	102.000.000
5.1.02.03.02.0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	50.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	237.036.500
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	46.230.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	56.570.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	506.902.250
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	402.382.250
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	104.520.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.309.524.920
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.400.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	780.066.920
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	129.458.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.658.763.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.658.763.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.851.754.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.807.009.800
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	928.720.440
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	317.250.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	257.250.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	24.000.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	36.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	611.470.440
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	219.870.440
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	391.600.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.423.400.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.423.400.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.423.400.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.879.411.200
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.879.411.200
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.879.411.200
5.1.05	Belanja Hibah	14.000.829.260
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.696.319.260
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.416.119.260
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.416.119.260
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.915.200.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.915.200.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.365.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.365.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.348.000.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2.348.000.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2.348.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	956.510.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	956.510.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	956.510.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>158.542.343.430</b>

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.450.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.450.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.681.307.113
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.315.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.315.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	7.315.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.852.141.800
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.380.141.800
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.223.600.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	132.541.800
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	470.000.000
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	470.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.000.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	8.000.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	8.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	26.674.200
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	26.674.200
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	26.674.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.298.165.055
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.017.401.305
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	364.690.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	652.711.305
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.061.663.750
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	234.814.250
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	16.750.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	364.331.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	444.568.500
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.200.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	219.100.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	71.250.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	100.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	30.000.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	17.850.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.987.105
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16.987.105
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.149.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	14.838.105
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.388.935.470
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.734.301.870
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.554.985.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.004.950.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.099.326.680
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.824.590.190
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	250.450.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.654.633.600
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.654.633.600
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	76.600.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	13.500.000
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	3.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	10.500.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	52.000.000
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	2.000.000
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	50.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	11.100.000
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	11.100.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.929.435.333

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.536.095.433
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.536.095.433
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	393.339.900
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	342.414.019
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	50.925.881
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	267.016.150
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	267.016.150
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	267.016.150
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.810.037.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.810.037.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.810.037.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.726.563.700
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.626.563.700
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.626.563.700
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.028.362.900
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	300.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	66.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.942.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.290.200.800
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.599.487.617
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	65.150.327.947
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	57.150.327.947
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	57.150.327.947
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.000.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.000.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	49.296.959.670
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	45.662.641.430
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	37.540.287.430
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.122.354.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.634.318.240
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.634.318.240
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.002.200.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.752.200.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.752.200.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	250.000.000
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	250.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.985.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	35.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	35.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	35.000.000
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	49.985.000
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	49.985.000
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	49.985.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.500.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>163.560.509.900</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.855.500.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.585.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.585.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.585.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	270.500.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	270.500.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	270.500.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.705.009.900
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.705.009.900
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.705.009.900

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	157.705.009.900
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.528.328.746.724</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(136.602.909.712)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>151.602.909.712</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	151.602.909.712
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	151.602.909.712
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	151.602.909.712
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	151.602.909.712
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>151.602.909.712</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>136.602.909.712</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Padang Pariaman

SUHATRI BUR